

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada zaman sekarang ini sangat banyak ditemukan kejahatan dan pelanggaran, kejahatan dan pelanggaran adalah suatu hal yang sudah sangat wajar yang sering dilakukan oleh masyarakat, organisasi, atau perusahaan. Perusahaan yang di Indonesia sendiri perkembangannya sampai saat ini semakin meningkat. Meskipun banyak hukum atau peraturan yang sudah ditegakkan, tetapi perusahaan yang ada di Indonesia masih banyak yang melanggar dan tidak menaati hukum dan peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan yang berlaku di masing-masing perusahaan.

Dengan semakin berkembangnya perusahaan maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan semakin kompleks, sehingga semakin sulit bagi pihak pimpinan untuk melaksanakan pengawasan atau mengkoordinir secara langsung terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Hal ini disarankan perlu adanya bantuan manajer-manajer yang profesional sesuai dengan bidang yang ada dalam organisasi misalnya pemasaran, produksi, keuangan dan lain-lain. Perlu adanya struktur organisasi yang memadai yang akan menciptakan suasana kerja yang sehat karena setiap staf bisa mengetahui dengan jelas dan pasti wewenang dan tanggung jawabnya serta dengan siapa ia bertanggung jawab (Tarukdatu,2013).

Pengendalian intern merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam perusahaan untuk memeriksa, mengevaluasi aktivitas-aktivitas perusahaan dan menjaga harta perusahaan yaitu salah satunya adalah “kas”. Pengendalian intern harus mempunyai kedudukan khusus dalam struktur organisasi perusahaan agar pengendalian intern independen dan objektif dalam memeriksa dan menilai berbagai kebijakan, sistem, prosedur, dan catatan perusahaan. Pengendalian intern sebaiknya dilakukan seorang yang independen dari pengaruh departemen atau bagian-bagian yang dipaksa. Bila pengendalian intern tak diterapkan maka terjadi penyimpangan terhadap prosedur dan ketentuan yang telah dirancang sehingga kegiatan perusahaan menjadi tidak efektif (Lumempouw, 2015).

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kelayakan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010:163)

Dengan itu maka, tujuan penyusunan sistem adalah memperbaiki informasi, memperbaiki *internal control* dan pengawasan akuntansi, mengurangi biaya administrasi. Agar mendapatkan sebuah sistem yang baik dan bermanfaat bagi pihak luar maka pengawasan dan pengendalian harus dijalankan sebaik-baiknya. Alat pengendalian itu bisa berupa

kebijakan-kebijakan dan prosedur dan selanjutnya kebijakan dan prosedur itu yang akan membentuk suatu struktur pengendalian internal (Lumempouw, 2015).

Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Cynthia Amanda, 2015 berpendapat bahwa pengendalian internal atas persediaan pada Grand Hardware sudah efektif, dimana adanya pemisahan diantara fungsi-fungsi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. Pemantauan terhadap persediaan barang dagangan juga dilakukan secara periodik oleh bagian logistik melalui kegiatan *stock opname*. Ketut Widiassa, 2015 berpendapat bahwa struktur organisasi pada UD Tirta Yasa sudah cukup memadai, tetapi masih banyak bagian-bagian yang kosong dan mengakibatkan perangkapan jabatan pada karyawan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran sediaan barang masih belum memadai, dikarenakan masih belum adanya pemisahan atau bagian khusus untuk menangani masalah ini. Efektivitas pengelolaan persediaan barang dagang yang dilakukan oleh UD Tirta Yasa sudah efektif namun kurang memadai, karena masih mempunyai kekurangan pada dokumen-dokumen yang seharusnya digunakan dalam sistem pembelian barang sediaan. Hal ini menambah lemahnya sistem pengendalian dikarenakan dokumen-dokumen tersebut seharusnya bisa menjadi alat pengendalian internal. Jakfar Shodiq, 2016 berpendapat bahwa pengendalian intern metode COSO yang dilaksanakan pada Bimbingan Belajar Gilland Ganesha terdapat beberapa hal yang tidak sesuai yaitu terjadinya perangkapan jabatan dan fungsi jabatan, seperti administrator memiliki

fungsi penerimaan dan pencatatan. Srijantri Seredei, 2015 berpendapat bahwa berdasarkan unsur-unsur pengendalian intern mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan persediaan barang dagangan PT. Suramando sudah efektif, dimana adanya pemisahan diantara fungsi-fungsi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. Pemantauan terhadap persediaan juga dilakukan tiap hari. Selain itu, adanya petugas keamanan dan kamera CCTV membuat persediaan lebih aman. Antonio Careca, 2015 menyatakan bahwa pengendalian intern atas persediaan harus ada pemisahan antara fungsi-fungsi terkait, pemisahan tugas hendaknya dilakukan pada fungsi penerimaan barang dan pengeluaran barang. Pemantauan terhadap persediaan barang dagangan juga dilakukan secara periodik oleh bagian logistik melalui *stock opname*, selain itu pengendalian internal atas persediaan mutlak diperlukan mengingat aset ini tergolong cukup lancar. Sesungguhnya tujuan utama diterapkannya pengendalian internal adalah untuk mengamankan atau mencegah aktiva perusahaan (persediaan) dari tindakan pencurian, penyalahgunaan, dan kerusakan, serta menjamin keakuratan (ketepatan).

Ditemukan berita tentang pencurian kayu berada di KPH Bondowoso yang dilakukan oleh warga miskin asal Desa Jatibanteng, kabupaten Situbondo yang bernama Asiani dengan umur 63 tahun, beliau mendekam di penjara sejak 15 Desember 2015, lantaran diduga mencuri pohon jati milik Perhutani KPH Bondowoso (www.okezone.com).

Dari penelitian-penelitian terdahulu, dan berita pencurin kayu yang ada di KPH Bondowoso penulis mencoba menyimpulkan bahwa

pengendalian internal merupakan fungsi manajerial yang sangat penting, karena pengendalian internal ini banyak melibatkan investasi rupiah dan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. Selain itu pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran barang yang masih belum cukup memadai serta dokumentasi, dapat mengingatkan manajemen mengurangi keterlambatan penerimaan barang. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap prosedur pengangkutan dan penerimaan kayu sampai ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu) sangat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya selisih, kehilangan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan baik sehingga kemudian dapat dibuatlah perbaikan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terhadap Prosedur Pengangkutan dan Penerimaan Kayu pada Perum Perhutani unit II-KPH Bondowoso.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Perum Perhutani KPH Bondowoso terhadap prosedur pengangkutan dan penerimaan kayu?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern atas prosedur pengangkutan dan penerimaan kayu pada Perum Perhutani KPH Bondowoso.
2. Untuk menganalisis apakah pengendalian intern pengangkutan dan penerimaan kayu dengan yang diterapkan sudah sesuai dengan komponen pengendalian internal bagi Perum Perhutani KPH Bondowoso.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan pengendalian intern terhadap prosedur pengangkutan dan penerimaan kayu pada perum perhutani unit II-KPH Bondowoso,
2. Bagi Perum Perhutani unit II-KPH Bondowoso, memberikan sumbangan masukan bagi manajemen yang berguna untuk memperbaiki kebijakan perusahaan atas pengendalian internal sistem informasi akuntansi aktivitas pengangkutan kayu dan penerimaan kayu,
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya yang akan melakukan ataupun yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan judul skripsi ini

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup atau pembatasan dimaksudkan agar dalam pembahasan skripsi ini tidak keluar dari apa yang dimaksud dan tujuan penulisan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada penerapan prosedur pengangkutan dan penerimaan kayu Perum Perhutani KPH Bondowoso. Dalam penelitian ini diamati hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur organisasi untuk mengetahui pihak-pihak yang berwenang melakukan pengendalian intern atas fungsi prosedur pengangkutan dan penerimaan kayu.
2. Prosedur pelaksanaan sistem pengendalian intern pengangkutan dan penerimaan kayu pada Perum Perhutani KPH Bondowoso untuk mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan sistem pengendalian intern atas prosedur pengangkutan dan penerimaan kayu.
3. Dokumen-dokumen transaksi yang mendukung berkaitan dengan tahapan-tahapan prosedur pengangkutan dan penerimaan kayu untuk mengetahui apakah kinerja pengangkutan dan penerimaan kayu sudah sesuai dengan prosedur dan pengendalian internal perum perhutani sudah sesuai dengan analisis komponen-komponen pengendalian internal.